



Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo bersama Wali Kota Batam M Rudi dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo saat penanaman pohon di Jembatan Layang, kemarin.

3.300 Pohon Hijaukan Jembatan Layang

BATAM KOTA – Pemko Batam menanam 3.300 berbagai jenis pohon di sepanjang Jembatan Layang Laluan Madani sampai Simpang Kabil, Batam Center, Minggu (6/5) pagi. Pemko mengajak BP Batam, Ke-

polisian, TNI, Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Batam dan organisasi kemasyarakatan dalam gerakan penanaman pohon. Paling banyak bibit pohon yang ditanam adalah Ketapang Kencana

sebanyak 1.300 batang. Lalu sisanya Tabebuaya, Mahoni, Trembesi, Salam dan Flamboyan yang bertotal 2.000 batang. Bibit pohon ditanam sepanjang 3,3 kilometer dari Jembatan Layang Laluan Madani

sampai Simpang Kabil atau 46 titik. "Ini sebagai pengganti banyak pohon yang dipotong untuk pelebaran jalan," ungkap Wali Kota Batam Muhammad Rudi di sela-sela penanaman pohon, kemarin.

Gerakan penanaman pohon ini juga bagian dari penanaman program Satu Juta Pohon Ketapang yang digadang-gadang Pemko Batam.

Ke hal 12

Revisi Pajak Hiburan Belum Putus

BATAM KOTA – Revisi Pajak Hiburan belum juga putus sementara pengusaha tetap dipungut pajak sebesar 35 persen yang diatur Perda No.7/2017 sampai revisi diteken.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan revisi Perda masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Batam. Ada beberapa poin yang perlu dilakukan diskusi secara mendalam sebelum dikeluarkan keputusan akhir. Sejauh ini muncul dua opsi yakni penundaan penerapan peraturan hingga akhir tahun dan tarif pajak diturunkan dari 35 persen menjadi 25 persen. "Belum ada keputusan, masih di DPRD. Kami menunggu, nanti akan ada pertemuan untuk pembahasan data," kata dia, kemarin.

Dalam pembahasan data tersebut, kata dia, DPRD yang mengajukan permintaan revisi perda pajak hiburan wajib memberikan alasan logis terhadap penundaan pajak sesuai Perda Nomor 7 tahun 2017. "Pemohon harus memberikan alasan dan disampaikan dalam diskusi nanti," ujarnya.

Dia menambahkan sebelum ada keputusan akhir antara keduanya, maka pengusaha atau Wajib Pajak (WP) tetap membayarkan pajak sesuai dengan yang tertuang didalam Perda. "Sepanjang belum ada keputusan, maka Perda tetap berlaku," jelas Raja.

Ke hal 12

Pemko Didesak Masukkan Prolegda

BATAM KOTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018 yang akan diharmonisasikan. Ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas semester satu yang belum dibahas.

"Hingga kini belum ada yang masuk. Paling lambat Juni nanti sudah selesai diharmonisasi," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihalofo di Batam Centre, Minggu (6/5).

Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan Perda No.4/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Perda No.6/2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah.

Selanjutnya, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perubahan atas Perda No.8/2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi tertentu serta perubahan Perda No.12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan. "Seluruhnya adalah pengajuan dari pemerintah daerah. Seharusnya

mereka komitmen dengan apa yang sudah diajukan," katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Sukaryo menambahkan Pemko Batam harus segera menyelesaikan Perda di luar harmonisasi yang sudah disepakati. Salah satunya yang menjadi prioritas utama 2018 yakni pengelolaan sampah dengan tipping fee yang belum juga dibahas serta belum adanya

pembentukan pansus.

"Seharusnya sesuai aturan Perda, didahului pembicaraan. Namun sejauh ini belum ada arah ke sana," kata Sukaryo.

Sebab sesuai tahapan, lanjut Sukaryo, setelah adanya tahapan pembicaraan, pemko menyurati DPRD Batam dan sekaligus menjadwalkan harmonisasi Ranperda di Rapat Paripurna.

● iwan sahputra

Mudik Gratis...

(Dari hal 9

Selama mudik dengan kapal Pelni, penumpang mendapatkan fasilitas tempat tidur, mandi air hangat, asuransi, makan sahur atau buka puasa, hiburan live musik di salon kapal, ibadah dan aneka kegiatan produktif

pemanfaatan waktu berlayar. Mudik gratis dengan kapal laut dapat dikemas menawan, tidak membosankan dan memberikan nilai tambah bagi pemudik dan BUMN penyelenggara.

Sebagai gambaran, PT Pelni sendiri pada tahun ini kembali

dipercaya 24 BUMN untuk mengantarkan pemudik ke berbagai kota di seluruh pelosok nusantara. Mudik bareng BUMN akan didukung 26 armada kapal Pelni, terdiri satu armada tipe 3.000 pax 11 armada tipe 2.000 pax sembilan armada tipe 1.000

pax, tiga kapal tipe 500 pax dan dua kapal Roro. Angkutan lebaran dengan kapal laut akan dilaksanakan mulai H-15 tanggal (31/5) hingga H+ 15 (1/7).

Pada 2018 Kementerian BUMN menyediakan 202.300 tiket dengan berbagai moda

transportasi darat seperti kereta api dan bus. Hal itu pun didanai oleh 75 BUMN. Sedangkan untuk moda transportasi laut, 23 BUMN menyediakan tiket mudik gratis dengan kapal laut Pelni.

● fathurrohim

3.300 Pohon ...

(Dari hal 9

Rudi meminta bantuan Pangdam Bukit Barisan untuk mengerahkan anggota TNI dan bantuan Polri untuk terlibat penanaman sejuta pohon di Batam.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menjadi pembuka gerakan satu juta pohon tersebut yang selanjutnya akan diteruskan jajaran instansi pemerintah di Batam.

"Hari ini titik awal. Setiap dua atau tiga bulan kembali ada gerakan penanaman. Batam akan hijau semua," sambung Rudi.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah

Tuwo sepakat menjadikan Batam kota yang hijau, indah dan modern. "Kebersamaan ini harus terus berlanjut terus dalam rangka menjadikan Kota Batam kota yang hijau," ungkap dia.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menyatakan jajarannya siap membantu Pemda setempat menjalankan pembangunan. Dia menilai gerakan penanaman pohon adalah langkah strategis untuk mengimbangi pembangunan sektor industri dengan menjamin ketersediaan air dan menjaga kualitas udara. "Gerakan ini gerakan moral," ungkap dia.

● reni hikmalia

BPJS Edukasi ...

(Dari hal 9

Dia menilai banyak masyarakat yang belum mengetahui ketiga program tersebut sehingga dengan sosialisasi rutin dan kegiatan tersebut kesadaran masyarakat bertambah.

Warga yang hadir bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Disediakan satu mobil lengkap dengan petugas yang melayani pendaftaran.

Jefri menyatakan kegiatan menyasar pekerja informal yang bergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS

Ketenagakerjaan juga melindungi pekerja seperti pedagang. Kami hadir di pasar tradisional bertujuan untuk mengenalkan bahwa BPJS yang ada di Indonesia tak hanya BPJS Kesehatan melainkan juga BPJS Ketenagakerjaan," papar dia.

Rahman, salah satu pedagang di SP Plaza, Batuaji mengaku baru tahu bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Selama ini saya pikir (BPJS Ketenagakerjaan) hanya untuk pekerja di perusahaan saja," ujar dia.

● fathurrohim

Revisi Pajak ...

(Dari hal 9

Pengajuan revisi Perda No.7/2017 melihat kondisi ekonomi Batam yang sedang tidak bagus. Pajak sebesar 35 persen dinilai akan memberatkan pengusaha hiburan. Perda sendiri sudah diterapkan per 1 Maret 2018.

Sementara revisi dengan dua opsi, pertama diturunkan tarifnya menjadi 25 persen dan ditunda penerapannya sampai akhir tahun 2018.

Di antara pilihan tersebut Pemko ingin memilih opsi pertama, yakni pajak hiburan tetap akan dinaikkan tarifnya dari tahun sebelumnya dengan catatan tarif tersebut tidak mengacu kepada Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, agar PAD Batam tetap meningkat namun tidak memberatkan para pelaku usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman me-

mintakan agar BP2RD menyajikan data dalam pembahasan, agar keputusan yang akan ditetapkan penuh dengan pertimbangan baik dari sisi PAD serta lesunya perekonomian Batam. Kendati demikian, Hendra menambahkan bahwa fraksi Golkar juga akan mematuhi segala mekanisme dan proses yang berlaku sesuai aturan main yang telah ditetapkan.

"Prinsipnya kami dari Gol-

kar mendukung untuk ditunda sampai keadaan ekonomi Batam kembali membaik," kata Hendra. Seperti diberitakan, Pemko Batam menaikkan pajak hiburan hingga 35 persen terhitung 1 Maret 2018. Kenaikan itu diatur dalam Perda No.7/2017. Sebelumnya tarif pajak hiburan sebesar 15 persen.

Dalam perda tersebut, diterapkan sejumlah pajak sesuai usaha hiburan. Kenaikan ter-

tinggi dialami tempat hiburan diskotek, klub malam dan sejenisnya dari 15 persen menjadi 35 persen, atau naik sebesar 20 persen. Lewat kenaikan ini, Pemko Batam ingin mengejar kenaikan PAD. Dalam perjalanannya, sejumlah asosiasi pengusaha seperti PHRI, ASITA dan Apindo menolak kenaikan pajak hiburan di saat ekonomi sedang buruk.

● iwan syahputra